

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah perantara keuangan yang membantu pemindahan dana dari pemasok ke peminta dana. Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan depository (bank), perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas dan bank investasi, reksa dana, serta perusahaan pembiayaan. Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang bertugas memberikan layanan yang menyangkut keuangan didalamnya pemberian jasa bantuan modal atau pembiayaan (Siamat dalam Samti, 2011).

Sistem lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi 2 kategori yaitu perbankan dan non bank. Perbankan ini diawasi oleh bank Indonesia yang terbagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan non bank diawasi langsung oleh departemen keuangan diantaranya terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, dana pensiun, pegadaian dan pasar modal (Samti, 2011).

Pada saat ini Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), telah menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat. Masyarakat semakin familiar dengan keberadaan berbagai jenis lembaga keuangan bukan bank, ini karena memiliki beberapa nilai tambah dibandingkan

perbankan seperti prosedur pembiayaan yang tergolong lebih sederhana, adanya aspek ikatan emosional (keanggotaan), serta pendekatan lebih personal dari pegawai LKBB. Walaupun terkadang LKBB mengenakan suku bunga/imbalan hasil pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan lembaga perbankan, namun berbagai keunggulan tersebut menyebabkan sebagian kelompok masyarakat menggunakan jasa LKBB (Samti, 2011).

Pada saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki lembaga non bank yang berperan penting dalam usaha mengurangi kemiskinan di Indonesia yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palu pada tanggal 30 April 2007 yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga (PNPM-Mandiri Perdesaan Kubar, 2012).

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam bentuk bantuan dana yang dikompertisikan pada tingkat kecamatan penerima bantuan program sehingga setiap desa berusaha untuk menggali potensi SDM ataupun SDA agar dapat diberikan atau memperoleh anggaran pembangunan prasarana (umum, pendidikan, kesehatan maupun keterampilan) dan anggaran kegiatan ekonomi (dana simpan pinjam bergulir) oleh pemerintah (Karyana, 2010).

Dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan khususnya dalam pengelolaan keuangan dana bergulir dan penyaluran dana pembangunan prasarana fisik dilakukan oleh sebuah

lembaga yang masih dalam naungan PNPM-Mandiri Perdesaan yaitu UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan). UPK adalah lembaga yang bertugas mengelola dana yang disalurkan oleh pemerintah dalam program PNPM-Mandiri Perdesaan dan diawasi serta dibina oleh satuan kerja dari pusat, propinsi, dan kabupaten. UPK merupakan lembaga keuangan non bank yang dibentuk sebagai perwakilan masyarakat kecamatan penerima dalam hal ini berstatus pegawai swasta pada program pemerintah dengan prinsip kerja mengacu pada PTO (Petunjuk Teknis Operasional) sebagai acuan langkah kerja dan pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan (Karyana, 2010).

Namun, program ini tidak selalu dapat berjalan dengan lancar dan baik, tentunya beragam permasalahan yang timbul, salah satunya adalah mengenai kemacetan atau ketidاكلancaran pengembalian kredit oleh pihak debitur (sebagai penerima kredit). Banyak terjadi kasus disebabkan terhambatnya pengembalian kredit seperti penunggakan bahkan kemacetan pembayaran angsuran (Muhamamah, 2008). Sehingga pihak kreditur mengalami kesulitan untuk meminta angsuran pengembalian kredit. Dengan hal itu maka pihak kreditur hendaknya berhati-hati dalam memberikan keputusan kredit walaupun kepercayaan merupakan modal awal lembaga pembiayaan dalam menjalankan usahanya (Samti, 2011).

Analisa kredit adalah proses menganalisa dan menilai prospek calon debitur guna memperoleh indikasi kemungkinan terjadinya *default* (kegagalan debitur membayar kembali kredit yang diterimanya). Langkah

yang tepat untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapi dalam pemberian kredit adalah melakukan teknik analisa pemberian kredit (Siamat dalam Samti, 2011). Menurut Kasmir (2010: 108-111) dalam menganalisis pemberian kredit dapat menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, colleteral, dan condition*) dan 7P (*personality, party, perpose, prospect, payment, profitablity, protection*).

Dengan demikian, sebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit oleh pihak kreditur hendaknya pihak kreditur melakukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap calon debitur atau anggota, guna mencegah timbulnya suatu risiko kredit. Dengan adanya resiko tersebut ada kemungkinan kredit tidak tertagih. Walaupun berbagai antisipasi telah dilakukan, kredit bermasalah tetap ada dalam lingkungan lembaga pembiayaan. Karena, pemberian kredit yang tidak memperhatikan kebijaksanaan dan prosedur yang ada akan mengundang timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang lain, semakin jauh pemberian kredit dari pedoman yang telah disusun maka akan semakin besar persentase kredit macet. Salah satu hal yang paling penting dalam pemberian kredit yaitu dengan melakukan deteksi dini (evaluasi kembali) atas kredit yang diduga akan bermasalah, sehingga kredit tersebut dapat diselamatkan dan terhindar dari kemacetan (Lady, 2008). Maka pihak kreditur hendaknya berhati-hati dalam memberikan kredit dan yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali (Samti, 2011). Meskipun sifat kehati-hatian dan ketelitian tidak menghilangkan seratus persen

ketidakpastian, namun dengan kecermatan setidaknya dapat membantu memperkecil risiko (Marantika, 2013).

Pada tahun 2008, di Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli telah berdiri sebuah lembaga yang bernama UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan). Lembaga ini dibangun oleh sebuah program pemerintah yaitu PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) yang akan bertugas mengelola keuangan dan menyalurkan seluruh dana bergulir di tingkat kecamatan, yakni pada kelompok-kelompok peminjam yang telah terbentuk. Kelompok peminjam merupakan pengelola dan penyalur dana bergulir kepada anggotanya. Ada beberapa jenis kegiatan yang dikelola oleh UPK PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut: 1) kegiatan pembangunan, 2) kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, 3) kegiatan peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi dan, 4) penambahan permodalan SPP (Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan).

Salah satu kegiatan yang dikelola UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli yaitu kegiatan SPP (Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan), telah memberikan kesempatan berusaha bagi kaum perempuan melalui pinjaman dana bergulirnya. Dengan adanya pinjaman dana yang diberikan maka anggota mendapat penambahan modal dalam menjalankan atau mengembangkan usahanya. Bantuan modal dalam bentuk kredit tersebut tentunya diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jufri Yunus selaku Ketua PNPM MPd Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli diperoleh konfirmasi bahwa pada kegiatan SPP atau Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli memiliki 700 anggota dari 70 kelompok dalam satu kecamatan. Setiap kelompok awalnya mendapat alokasi dana pinjaman sebesar Rp 20.000.000,00 yang kemudian dana tersebut diberikan kepada tiap masing-masing anggota kelompok, yang terdiri dari 10 orang tiap kelompoknya sebesar Rp. 2.000.000,00 dengan suku bunga 1,8%, alokasi dana pinjaman selanjutnya sebesar Rp.5.000.000,00 tiap anggota, untuk anggota yang tidak berada di posisi kolektibilitas, dengan jangka waktu pinjaman dana yaitu maksimal 18 bulan. Namun, kegiatan SPP di Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli ini mengalami kemacetan kredit, diketahui dari 700 anggota kelompok SPP terdapat 550 anggota yang lancar pengembalian pinjamannya, dan 150 anggota tidak lancar pengembaliannya. Kelompok yang pengembaliannya lancar sekitar 80% diketahui dalam mengembalikan kredit selalu tepat pada waktunya, misalnya kelompok Bogenvil I dan Bogenvil II. Sedangkan 20% diketahui kelompok yang pengembaliannya tidak lancar, misalnya kelompok Dahlia dan Usaha Bersama. Hasil wawancara dengan salah satu anggota kelompok SPP mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab dari ketidaklancaran pengembalian kredit tersebut karena ada beberapa anggota dari kelompok tersebut tidak mampu mengembalikan dana pinjamannya yang

disebabkan oleh jumlah pinjaman dana yang besar dan ada pula pinjaman lainnya, tidak mampu dalam mengelola usaha, dan pendapatan/omset usaha yang diperoleh tidak digunakan sebaik mungkin dan dengan sengaja meninggalkan hutang pinjaman karena tidak mampu membayarnya sehingga hutang yang anggota tinggalkan harus ditanggung oleh kelompok, atau adanya faktor lain yang menyebabkan kemacetan kredit oleh pihak debitur atau anggota kelompok peminjam. Sehingga dapat memperlambat kelompok peminjam lain yang akan meminjam dana berikutnya.

Ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemacetan kredit. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Samti (2011) yang mengatakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemacetan kredit diantaranya adalah usia, jenis kelamin, status, pendidikan, lama menempati tempat tinggal, kepemilikan tempat tinggal, jarak GKV dengan lokasi rumah, jumlah tanggungan keluarga, pinjaman lain, pengalaman usaha, omset usaha, agunan, suku bunga, jangka waktu pengembalian kredit. Penelitian yang dilakukan Marantika (2013) mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemacetan kredit diantaranya usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, keluarga, jumlah pinjaman, pengalaman usaha, dan omset usaha.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemacetan**

Pengembalian Kredit Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) PNM-Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pengembalian dana pinjaman pada kegiatan kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) mengalami kemacetan kredit
2. Ketidakmampuan anggota kelompok dalam mengembalikan dana pinjaman pada kelompok peminjam Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penilaian dan penyaluran pihak Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli terhadap calon kelompok peminjam?
2. Bagaimana karakteristik anggota kelompok yang bermasalah pada kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli?

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemacetan kredit pada PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses penyaluran dan penilaian pihak Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli terhadap calon kelompok peminjam
2. Mengidentifikasi karakteristik anggota kelompok yang bermasalah pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemacetan kredit pada PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi terutama dalam hal

faktor-faktor yang mempengaruhi kemacetan pengembalian kredit. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pemerintah Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli sebagai penentu kebijakan. Serta memberikan kontribusi bagi pengurus UPK PNPM Mandiri Perdesaan khususnya Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) agar lebih efektif dan efisien dalam pengembangan dan pengelolaan dana perguliran.